KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Penutupan 122 program studi di perguruan tinggi menuai polemik
Tanggal : Sabtu, 06 Juni 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Penutupan 122 Program Studi Di Perguruan Tinggi Menuai Polemik

KEBIJAKAN penutupan 122 program studi (prodi) di perguruan tinggi sepanjang 2026 menuai pro kontra. Kebijakan itu berpotensi berdampak pada dosen, mahasiswa dan keberlangsungan kampus.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menegaskan penutupan tersebut dilakukan atas usulan perguruan tinggi masing-masing. Namun, sejumlah pihak menilai kebijakan itu perlu dikaji lebih mendalam.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan, hingga tahun 2026 telah terdapat 122 program studi yang ditutup. Menurutnya, seluruh penutupan tersebut dilakukan berdasarkan usulan badan penyelenggara perguruan tinggi negeri maupun swasta.

"Sepanjang tahun 2026 memang telah dilakukan penutupan 122 program studi, tetapi seluruh penutupan itu berdasarkan usulan dari badan penyelenggara, baik PTN maupun PTS," kata Brian dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Selasa.

Brian menjelaskan, sejumlah program studi ditutup, karena mengalami penurunan jumlah mahasiswa. Selain itu, ada pula kampus yang memilih mengganti program studi lama dengan program yang dinilai lebih sesuai dengan kebutuhan saat ini. Sebagai contoh, program studi Matematika dikembangkan menjadi Aktuaria.

Ia menegaskan, Pemerintah tidak memiliki kebijakan khusus untuk menutup program studi demi menyesuaikan kebutuhan industri. Menurutnya, yang dilakukan adalah pengembangan program studi dan penyesuaian substansi keilmuan.

"Sesungguhnya program studi itu tidak ditutup, tetapi lebih kepada substansinya. Misalnya yang sebelumnya Teknik Elektro, kemudian berkembang menjadi AI, *machine learning*, atau *robotics*," ujarnya.

Brian menambahkan, evaluasi terhadap program studi dilakukan secara berkala oleh asosiasi atau badan kerja program studi guna menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat.

Ia juga menegaskan bahwa penutupan program studi hanya dapat dilakukan berdasarkan usulan perguruan tinggi yang bersangkutan atau sebagai konsekuensi dari sanksi atas pelanggaran berat. Setelah usulan diajukan, Kemdiktisaintek akan menerbitkan surat keputusan penutupan.

Menanggapi kebijakan tersebut, Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Hoerudin Amin menilai, penghapusan program studi yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman dapat dipahami. Menurutnya, terdapat program studi yang sudah tidak diminati mahasiswa sehingga, jika terus dipertahankan hanya akan menambah beban administrasi perguruan tinggi.

"Prodi-prodi yang dihapus itu memang saat ini dinilai sudah tidak lagi relevan dengan kebutuhan, situasi, dan perkembangan masyarakat kita. Kalau dipaksakan tetap berjalan juga kurang baik," ujarnya.

Berbeda dengan DPR, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, mengkritik keras kebijakan tersebut. Ia menilai pernyataan Pemerintah yang menyebut penutupan prodi dilakukan atas permintaan kampus merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab negara terhadap persoalan pendidikan tinggi.

"Ketika prodi-prodi ilmu murni, sastra daerah, filsafat, atau sosiologi ditutup demi membuka prodi yang dianggap lebih kekinian, kita perlu mempertanyakan kembali arah pendidikan tinggi kita," ujarnya.

Untuk mengetahui lebih dalam, berikut wawancara Ubaid Matraji dan Muhammad Hoerudin Amin terkait penutupan 122 prodi di perguruan tinggi.

UBAID MATRAJI
Koordinator Nasional JPPI

Bentuk Pengalihan Tanggung Jawab



"Pemerintah seolah memandang prodi hanya sebagai angka dalam administrasi. Padahal, di balik 122 prodi yang ditutup terdapat banyak orang yang terdampak secara langsung.

Apa pandangan Anda terkait kebijakan penutupan 122 program studi (prodi)?

Pernyataan Menteri Pendidikan Tinggi yang menyebut penutupan 122 prodi dilakukan atas permintaan kampus merupakan bentuk cuci tangan birokratis yang manipulatif. Mengatakan kampus menutup prodinya secara sukarela sama halnya dengan mengatakan pedagang kaki lima menutup lapaknya secara sukarela saat digusur Satpol PP.

Kampus-kampus tersebut tidak menutup prodi karena keinginan sendiri. Mereka melakukannya karena sistem tata kelola pendidikan tinggi yang diciptakan negara telah membuat mereka berada dalam tekanan yang sangat berat, hingga tidak mampu bertahan.

Bagaimana tanggapan Anda terhadap alasan bahwa prodi-prodi tersebut sepi peminat?

Argumen yang sering digunakan untuk menutup prodi adalah karena minim peminat dan lulusannya dianggap kurang terserap di dunia kerja.

Menurut saya, hal itu justru menunjukkan kegagalan negara dalam mendefinisikan makna pendidikan. Universitas tidak lagi dipandang sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban, melainkan sekadar tempat menyiapkan tenaga kerja.

Menurut Anda, apakah kebijakan ini berpotensi memicu PHK?

Pemerintah seolah memandang prodi hanya sebagai angka dalam administrasi. Padahal, di balik 122 prodi yang ditutup terdapat banyak orang yang terdampak secara langsung.

Pertanyaannya, ke mana para dosen dari prodi yang ditutup akan ditempatkan?

Mereka bisa saja dipindahkan ke prodi lain yang tidak sepenuhnya sesuai dengan bidang keahliannya. Kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas pembelajaran.

Dalam skenario yang lebih buruk, kampus-kampus swasta yang mengalami kesulitan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap dosen dan tenaga kependidikan. Sementara itu, mahasiswa yang masih aktif harus berpindah ke program studi lain, yang dapat mengganggu rencana studi dan masa depan akademik mereka.

Apa desakan Anda kepada Pemerintah?

Pemerintah tidak cukup hanya mencatat atau mengesahkan penutupan prodi. Negara harus hadir dengan kebijakan yang mampu memperkuat keberlangsungan pendidikan tinggi, menjaga kualitas akademik, serta memastikan akses pendidikan tetap terbuka bagi seluruh masyarakat.

Bagi kami, persoalan ini bukan semata-mata soal efisiensi akademik, tetapi juga menyangkut arah dan visi pengembangan pendidikan tinggi nasional. ■ REN

MUHAMMAD HOERUDIN AMIN
Anggota Komisi X DPR RI

Jika Dipaksakan, Jadi Beban Administrasi



"Karena itu, perlu dilakukan pembaruan dengan menghadirkan prodi-prodi baru yang lebih sesuai dengan situasi, kondisi, serta perkembangan masyarakat saat ini.

Terkait penghapusan 122 program studi (prodi) di perguruan tinggi, bagaimana pandangan Anda?

Prodi-prodi yang dihapus itu memang saat ini dinilai sudah tidak lagi relevan dengan kebutuhan, situasi, dan perkembangan masyarakat kita.

Apakah Anda memaklumi kebijakan penghapusan prodi tersebut?

Ya, kami memaklumnya. Sebab, jika dipaksakan untuk tetap berjalan, justru kurang baik.

Bisa dijelaskan lebih lanjut alasannya?

Pertama, prodi tersebut sudah tidak diminati atau tidak memiliki peminat yang cukup. Kedua, jika terus dipertahankan, keberadaannya hanya akan menambah beban administrasi.

Karena itu, perlu dilakukan pembaruan dengan menghadirkan prodi-prodi baru yang lebih sesuai dengan situasi, kondisi, serta perkembangan masyarakat saat ini. Namun demikian, untuk bidang-bidang ilmu yang bersifat fundamental atau dasar, tentu tidak boleh dihapus begitu saja.

Penghapusan prodi ini juga berdampak pada dosen dan mahasiswa. Apakah DPR menyiapkan solusi terkait hal tersebut?

Kemarin kami memang sempat membahas persoalan ini dalam rapat. Namun, fokus utama saat itu masih berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru.

Meski demikian, salah satu poin yang dibahas adalah mengenai dosen, khususnya mereka yang home basenya berada pada prodi yang dihapus. Kami mendorong agar para dosen tersebut tetap dapat produktif dan dialihkan ke prodi-prodi baru yang memiliki keterkaitan dengan bidang keilmuan mereka.

Tentu diperlukan proses penyesuaian. Banyak dosen yang sebelumnya berada di prodi yang dihapus, sementara di saat yang sama muncul prodi-prodi baru yang membutuhkan tenaga pengajar. Karena itu, setiap perguruan tinggi didorong untuk tetap menyediakan ruang dan skema yang baik bagi para dosen tersebut. Namun, pembahasan mengenai hal ini memang belum selesai.

Berarti masih akan ada pembahasan lanjutan?

Insyaallah akan ada pembahasan lanjutan.

Bagaimana dengan nasib mahasiswa yang terdampak?

Saat ini kami masih berada pada tahap pembahasan dan penyampaian gagasan. Belum ada keputusan resmi yang dihasilkan dalam rapat kerja.

Insyaallah, setelah rapat kerja dengan Menteri selesai dilaksanakan, prodi yang dihapus, termasuk nasib mahasiswa dan dosen yang terdampak, akan dibahas kembali secara lebih mendalam. Dari sana nantinya akan diambil keputusan dan langkah tindak lanjut yang lebih jelas. ■ REN